

AKSES DAN PERSEPSI PETANI TERHADAP PEMBIAYAAN PERTANIAN MIKRO SYARIAH: STUDI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

UNDERSTANDING FARMERS' ACCESS AND PERCEPTION TO ISLAMIC MICROFINANCE ON AGRICULTURAL FINANCING: STUDY IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY

Budi Yoko¹, Adistiar Prayoga²

¹Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

²Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga

*Email: adistiarprayoga@gmail.com

ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung. Akan tetapi, berbagai permasalahan krusial masih ditemui dalam sektor pertanian, seperti rendahnya produktivitas yang dipicu oleh kepemilikan lahan yang sempit serta keterbatasan dalam permodalan. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu contoh lembaga keuangan mikro syariah di pedesaan yang dapat dioptimalkan perannya dalam meningkatkan akses petani terhadap sumber pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan peluang petani mengakses pembiayaan pertanian dari BMT serta persepsi petani terhadap keberadaan BMT. Hasil dari analisis persepsi menunjukkan bahwa petani menilai keberadaan BMT berperan penting dalam mendukung kegiatan usahatani ataupun aktivitas perekonomian lainnya. Dari sisi pelayanan karyawan, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta produk pembiayaan pertanian dari BMT, petani menilai hal tersebut sudah cukup baik. Petani menyatakan setuju terhadap masing-masing atribut persepsi dengan persentase yang berbeda. Hasil dari analisis dengan model regresi logistik menunjukkan bahwa variabel-variabel yang signifikan untuk meningkatkan peluang petani mengakses pembiayaan pertanian syariah dari BMT adalah jarak rumah petani ke kantor layanan BMT, *cost of fund*, dan pandangan petani terhadap sistem bunga kredit.

Kata kunci: pembiayaan pertanian, lembaga keuangan mikro, BMT

ABSTRACT

The agricultural sector is a major sector in economic activity in the province of Lampung. However, the crucial issues are still encountered in the agricultural sector, such as low productivity triggered by a narrow land ownership and restrictions on capital. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is one example of rural microfinance institutions that can be optimized role in improving farmers' access to financing sources. The purpose of this study was to identify the perceptions of farmers on the existence of BMT and identify factors that can increase the chances of farmers access the agricultural financing of BMT. The results of the analysis has pointed out that farmers assess the perception of the existence of BMT important role in supporting farming activities or other economic activity. In terms of employee services, facilities and infrastructure owned, as well as agricultural finance products from BMT, farmers assess it is already quite good. Farmers give agreed statements to each perception attribute with different percentages. The results of the analysis with the logistic regression model show that the significant variables to increase farmers' opportunities to access sharia agricultural finance from BMT are the distance of farmer's house to BMT service office, cost of fund, and farmer's view of the credit interest system.

Keywords: agricultural financing, microfinance, BMT

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian Provinsi Lampung. Data BPS Lamteng (2013) menunjukkan posisi sektor pertanian menempati urutan teratas penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan nilai kontribusi sebesar 36,05 persen. Besarnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian ternyata belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani. Data dari BPS Lamteng (2013) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 1.591.600 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.226.000 jiwa (77,03 persen) tinggal di daerah perdesaan, dan bekerja pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani, dan sisanya di sektor nonpertanian.

Dharmawan, *et al.* (2009) mengidentifikasi penyebab utama kemiskinan di sektor pertanian adalah rendahnya penguasaan sumberdaya produktif seperti lahan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal itu kemudian ditambah dengan probelm klasik lain seperti penguasaan teknologi yang masih minim dan ketersediaan infrastruktur yang masih belum memadai. Teknologi dan infrastruktur yang masih terbatas menyebabkan rendahnya produktivitas lahan yang diusahakan. Masyarakat petani di perdesaan juga dihadapkan pada kesulitan akses terhadap kelembagaan, baik pendidikan, keuangan (permodalan) dan lainnya. Kendala akses pada lembaga keuangan formal memperparah kondisi kemiskinan karena menyebabkan para petani terjebak kepada praktik *money lender*. (Beik dan Hafidudin 2008; Syarif 2014, Prayoga *et al.* 2017).

Karakteristik pertanian Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung masih identik dengan produktivitas yang rendah. Salah satu penyebabnya adalah kepemilikan lahan yang rendah, dimana rata-rata kepemilikan lahan petani di Provinsi Lampung hanya 0,78 ha. Selain itu, sebagian besar petani juga memiliki keterbatasan dalam sisi permodalan yang selanjutnya membatasi gerak sektor pertanian (Hamid *et al.* 1986; Syukur *et al.* 1990; Hermawan dan Andrianyta 2012). Usaha tani yang sebenarnya juga padat modal harus dibiayai dengan modal sendiri karena kesulitan mengakses modal dari luar, pasar maupun teknologi (Poliquit 2006; Nurmanaf 2007; Hendayana *et al.* 2009).

Pembiayaan pertanian merupakan salah satu kebijakan penting untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di perdesaan dan memiliki peran utama dalam pembangunan pertanian (Meyer dan Nagarajan 2000). Pentingnya kredit dalam pembangunan pertanian Indonesia terkait dengan tipologi petani yang sebagian besar merupakan petani kecil dengan penguasaan lahan yang sempit, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemupukan modal untuk investasi pada teknologi baru. Dengan demikian dukungan pembiayaan harus dilakukan. Syukur *et al.* (1990 dan 1998) menyatakan bahwa peran kredit sebagai pelancar pembangunan pertanian antara lain: (1) membantu petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan bunga yang relatif ringan, (2) mengurangi ketergantungan petani dengan pedagang perantara dan pelepas uang, dengan demikian berperan dalam memperbaiki struktur dan pola pemasaran hasil pertanian, (3) mekanisme transfer pendapatan diantara masyarakat untuk mendorong pemerataan, (4) insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi usahatani.

Peningkatan akses petani terhadap sumber permodalan dapat memperbaiki penggunaan input usahatani serta penguasaan terhadap teknologi, sehingga hal ini dapat mendorong peningkatan produktivitas usahatani (Zeller 1998). Dengan mengakses pembiayaan pertanian, rumah tangga petani dapat meningkatkan produksi dan pendapatan mereka. Akan tetapi, peningkatan aksesibilitas petani terhadap sumber pembiayaan masih menemui banyak kendala. Berbagai jenis kredit program yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia masih belum sesuai harapan (Ashari 2006), terutama jika *outreach* dari kredit program yang dijadikan sebagai parameter keberhasilan. Lembaga keuangan formal, seperti perbankan pun belum bisa diandalkan sebagai penyalur pembiayaan pertanian. Perbankan Indonesia terlihat kurang berpihak terhadap sektor pertanian, dimana jumlah pembiayaan yang disalurkan bagi sektor pertanian hanya 5,2 persen (BI 2012).

Dari berbagai permasalahan terkait dengan peningkatan akses petani terhadap sumber pembiayaan, salah satu solusi yang dapat didorong adalah pengoptimalan peran lembaga keuangan mikro, terutama yang berbasis di perdesaan. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang keberadaannya sudah banyak ditemui di perdesaan, khususnya di Lampung Tengah. Pada tahun 2012, BMT di Lampung Tengah berjumlah 40 unit dengan jumlah anggota sebanyak 2.143 orang. Pertumbuhannya BMT di Lampung Tengah dalam kurun waktu 15 tahun terakhir menunjukkan *trend* positif. Total asetnya mencapai Rp 255,08 Miliar (Puskopsyah Lampung 2013).

Keberhasilan BMT dalam meningkatkan akses petani terhadap sumber permodalan dapat dilihat dari banyaknya petani yang menerima fasilitas pembiayaan pertanian dari BMT serta jumlah

pembiayaan pertanian yang sudah disalurkan oleh BMT. Berdasarkan data dari BMT Surya Abadi, salah satu BMT di Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan September 2012 jumlah pembiayaan pertanian yang sudah mereka salurkan adalah Rp 27,61 Milyar. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peluang petani untuk mengakses pembiayaan pertanian di BMT.

Faktor-faktor yang mempengaruhi akses petani terhadap sumber pembiayaan terdiri dari tiga macam, yaitu: (1) faktor yang berasal dari dalam diri petani itu sendiri, (2) faktor penunjang, dan (3) faktor ekonomi. Ketiga faktor tersebut akan terintegrasi dengan sendirinya sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi akses petani terhadap sumber pembiayaan. Faktor yang berasal dari diri petani dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu: umur petani, tingkat pendidikan petani, jumlah anggota keluarga, pengalaman berusahatani, keikutsertaan dalam kepengurusan kelompok tani dan risiko kegagalan usahatani. Sedangkan faktor ekonomi terdiri dari: skala usahatani, kepemilikan lahan dan rasio pendapatan usahatani. Studi Anggraeni *et al.* (2013) mengenai akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah (BMT) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah adalah variabel *dummy* akses pinjaman, umur pengusaha UMKM, *dummy* jenis usaha 2 (manufaktur), dan omset usaha. Selain itu, diketahui juga bahwa pengusaha UMKM menjadikan lembaga mikro syariah (BMT) sebagai lembaga keuangan komplementer dengan perbankan formal. Adanya pembiayaan mikro syariah dari BMT ini terbukti memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM.

Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis persepsi petani terhadap BMT. Persepsi merupakan proses dimana individu memilih, mengorganisasikan dan mengartikan stimulus yang diterima melalui alat inderanya menjadi suatu makna, sehingga diperoleh suatu keputusan tertentu (Rangkuti 2003; Sumarwan 2004). Persepsi petani terhadap keberadaan BMT akan mempengaruhi preferensi petani untuk mengakses produk-produk dari BMT (Suraya *et al.* 2010). Tujuan dari penelitian adalah (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan aksesibilitas petani terhadap pembiayaan pertanian BMT di Kabupaten Lampung Tengah, (2) mengidentifikasi persepsi petani terhadap keberadaan BMT di Lampung Tengah.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan sentra pertanian di Provinsi Lampung dan terdapat petani yang mendapat pembiayaan pertanian dari BMT sebagai modal usahatani. Pengambilan sampel dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2014. Data disempurnakan pada Desember 2018.

Data dan Metode Pengambilan Contoh

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus BMT, dan petani anggota BMT yang mendapatkan pembiayaan pertanian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Data sekunder diperoleh dari dokumentasi BMT dan instansi yang terkait, seperti Dinas Pertanian, Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Lampung, dan BPS. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 121 sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling*. Penentuan jumlah sampel didasarkan pada asumsi populasi menyebar normal. Mengacu pada teorema batas sentral (*central limit theorem*) yang dikemukakan oleh Cooper dan Emory (1996), dengan ukuran sampel yang cukup besar ($n \geq 30$), rata-rata sampel terdistribusi di sekitar rata-rata populasi yang mendekati distribusi normal (Mahabirama *et al.* 2013).

Metode Analisis

Analisis Persepsi Petani terhadap BMT

Metode yang digunakan dalam analisis persepsi adalah skala pengukuran Likert. Skala Likert merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono 2012). Skala pengukuran yang digunakan untuk menilai jawaban responden dalam kuesioner yaitu nilai 5: sangat setuju/sangat puas, 4: setuju/puas, 3: ragu-ragu/biasa saja, 2: tidak setuju/tidak puas, 1: sangat tidak setuju/sangat tidak puas.

Analisis Akses Petani terhadap Pembiayaan Pertanian BMT

Untuk melihat peluang petani mengakses pembiayaan pertanian BMT digunakan analisis dengan menggunakan model regresi logistik. Model logistik merupakan model regresi linear yang variabel dependennya bersifat kualitatif yang mencerminkan pilihan di antara dua alternatif pilihan ya atau tidak (Intriligator 1978).

Model akses petani terhadap pembiayaan dari BMT adalah sebagai berikut:

$$P(X_i) = \frac{1}{1 + e^{\alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9}} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- $P(X_i)$ = Peluang petani mengakses pembiayaan pertanian BMT (1=Petani mengakses pembiayaan pertanian BMT, 0=Petani tidak mengakses pembiayaan pertanian BMT),
- α = intersep,
- β_i = Parameter peubah X_i ,
- X_1 = Usia Petani (tahun),
- X_2 = Tingkat Pendidikan (tahun),
- X_3 = Jarak rumah petani dengan kantor layanan BMT (km),
- X_4 = *Cost of fund* (Rupiah),
- X_5 = *Dummy* persepsi petani terhadap sistem bunga kredit (1 = Sistem bunga kredit dilarang/bertentangan dengan ajaran agama, 0 = Sistem bunga kredit diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama),
- X_6 = Jumlah anggota keluarga (orang)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu faktor pelancar pembangunan pertanian. Syukur *et al* (1990) memaparkan peranan pembiayaan atau kredit tersebut adalah: (1) membantu petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal, (2) mengurangi ketergantungan petani dengan pedagang perantara dan pelepas uang, dengan demikian berperan dalam memperbaiki struktur dan pola pemasaran hasil pertanian, (3) mekanisme transfer pendapatan diantara masyarakat untuk mendorong pemerataan, dan (4) insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi usahatani. Tetapi nyatanya masih banyak petani yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal yang memiliki tingkat suku bunga yang relatif rendah.

Analisis Faktor Peluang Akses Petani Ke Pembiayaan Pertanian Syariah BMT

Model yang digunakan untuk menduga faktor-faktor yang mempengaruhi peluang petani mengakses pembiayaan pertanian syariah dari BMT adalah model regresi logistik. Variabel atau faktor yang diduga mempengaruhi peluang akses petani terhadap pembiayaan pertanian syariah adalah usia petani, tingkat pendidikan formal petani, jarak rumah petani ke kantor layanan BMT, biaya yang harus dikeluarkan petani untuk mendapatkan pembiayaan (*cost of fund*), *dummy* pandangan petani terhadap sistem bunga kredit atau pinjaman, dan jumlah anggota keluarga petani (*family size*). Analisis model regresi logistik diuji dengan menggunakan *software* SAS 9.1. Berdasarkan hasil pengujian parameter secara simultan dengan uji G didapatkan nilai statistik uji chi-kuadrat sebesar 43,5335 dengan nilai ($p < 0,01$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik secara keseluruhan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akses petani terhadap pembiayaan pertanian BMT.

Hasil pengujian parameter secara parsial dengan uji wald pada Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat tiga peubah yang berpengaruh nyata pada selang kepercayaan 1 persen, yaitu jarak rumah petani ke kantor layanan BMT, *cost of fund*, dan pandangan petani terhadap bunga kredit dengan nilai *odds ratio* masing-masing 0,487, 5,037, dan 23,034. Variabel jarak rumah petani ke kantor layanan BMT memiliki tanda koefisien negatif, artinya semakin jauh jarak rumah petani dengan kantor layanan BMT maka peluang petani untuk mengakses pembiayaan pertanian akan semakin kecil. Apabila rumah petani lebih dekat dengan kantor layanan BMT, maka petani lebih mudah dan cepat dalam mengakses informasi tentang BMT, sehingga dapat meningkatkan peluang petani dalam mengakses pembiayaan. Hal ini selaras dengan Ibrahim dan Bauer (2013) yang menyatakan semakin jauh jarak rumah petani maka biaya transaksi yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan

pembiayaan akan semakin besar. Dari sisi BMT selaku kreditur, lebih mudah untuk mengenali karakter dan memonitoring petani sebagai calon debitur yang memiliki rumah lebih dekat dibandingkan dengan petani yang rumahnya lebih jauh, sehingga hal ini dapat meningkatkan peluang disetujuinya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh petani. Temuan ini sesuai dengan Okten dan Osili (2004), yang menyatakan biaya untuk *screening* dan *monitoring* debitur dipengaruhi oleh jarak rumah debitur ke kantor layanan lembaga keuangan.

Tabel 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peluang Petani Mengakses Pembiayaan Pertanian Syariah BMT

Parameter	Estimate	Pr > ChiSq	Odds Ratio
Usia Petani	-0,0295	0,3148	0,9710
Tingkat Pendidikan	0,0622	0,4846	1,0640
Jarak Rumah Petani - KJKS	-0,7202	0.0001 ^a	0,4870
<i>Cost of Fund</i>	-3,1370	0,0005 ^a	23,0340
<i>Dummy</i> Bunga Kredit	1,6168	0,0189 ^a	5,0370
Jumlah Anggota Keluarga	0,2309	0,4527	1,2600
<i>Intercept</i>	2,0743	0,3257	
<i>Number of Obs</i>	121		

a berpengaruh nyata pada α 0.01

Variabel pandangan petani terhadap sistem bunga kredit memiliki tanda koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa petani yang berpandangan bahwa sistem bunga itu dilarang atau bertentangan dengan ajaran agama memiliki kecenderungan untuk mengakses pembiayaan ke BMT. Berdasarkan temuan di lapang, diketahui bahwa jumlah petani contoh yang berpandangan bahwa sistem bunga dilarang atau bertentangan dengan ajaran agama hanya 15,70 persen. Artinya, masih banyak masyarakat (terutama petani) yang belum mengerti atau paham tentang hukum dari sistem bunga, terutama dari sudut pandang islam (karena sebagian besar petani di daerah penelitian beragama islam). Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BMT untuk dapat mengedukasi masyarakat tentang pola syariah yang diterapkannya. BI (2010) menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi atau *public education* dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah adalah kunci keberhasilan pengembangan sistem keuangan syariah. Apabila pengetahuan dan pandangan masyarakat dapat berubah, maka peluang BMT untuk melakukan penetrasi pasar akan semakin besar.

Tabel 2. Perbandingan *Cost of fund* BMT dan KSP

Atribut <i>Cost of fund</i>	BMT (Rp)	KSP (Rp)
Persyaratan pengajuan pembiayaan (berkas)	2.136,50	2.385,88
Iuran pokok dan iuran wajib	4.426,45	6.352,94
Biaya administrasi pembiayaan	15.000,00	25.000,00
Margin pembiayaan atau bunga kredit	23.946,02	34.823,53
Jumlah <i>cost of fund</i>	45.508,37	68.562,35
Rasio <i>cost of fund</i> dengan jumlah pembiayaan	4,6 %	6,9 %

Biaya untuk mendapatkan pembiayaan (*cost of fund*) menjadi salah satu variabel utama yang menentukan peluang petani untuk mengakses pembiayaan pertanian BMT. Koefisien variabel *cost of fund* memiliki tanda negatif, hal ini berarti semakin besar biaya yang harus dikeluarkan petani maka peluang petani untuk mengakses pembiayaan ke BMT akan semakin kecil. Hasil ini sesuai dengan temuan Rivai *et al.* (2008) dan Reyes *et al.* (2012), dimana variabel biaya merupakan salah satu hal yang menjadi penentu keputusan seseorang untuk mengakses lembaga keuangan, terutama produk pembiayaan.

Dalam penelitian ini juga dilakukan perbandingan *cost of fund* antara lembaga keuangan syariah (sampel BMT) dan lembaga keuangan mikro konvensional (sampel koperasi simpan pinjam). Hasil perbandingan *cost of fund* kedua jenis lembaga keuangan mikro ini disajikan pada Tabel 2. Komponen *cost of fund* dalam penelitian ini mencakup biaya yang dikeluarkan petani untuk

memenuhi berkas pengajuan pembiayaan, biaya administrasi, dan margin atau bunga. Dari Tabel 2 terlihat bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh petani untuk mendapatkan Rp1.000.000 pembiayaan di BMT adalah Rp 45.946,37. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan KSP yang mencapai Rp 68.562,53. Temuan ini memperkuat hasil analisis dengan model logit, dimana nilai *odds ratio* dari variabel *cost of fund* cukup besar dalam meningkatkan peluang petani untuk mengakses pembiayaan dari BMT.

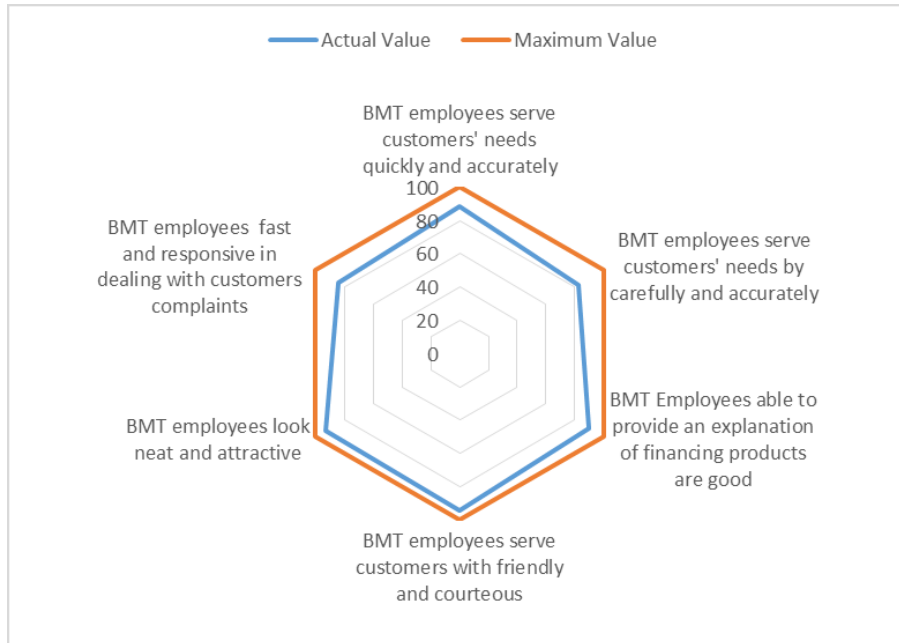
Persepsi Petani Terhadap Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Persepsi adalah proses dalam memahami lingkungan yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologis (Silalahi 2012). Analisis persepsi dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana persepsi petani padi anggota BMT terhadap keberadaan BMT. Persepsi petani yang dilihat dibagi dalam tiga instrumen kelompok, yaitu 1) persepsi petani terhadap pelayanan dari karyawan BMT, 2) persepsi petani terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki BMT, dan 3) persepsi petani terhadap produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT. Hasil analisis persepsi menggunakan Skala Likert menunjukkan bahwa, persepsi petani terhadap BMT dilihat dari ketiga aspek sudah baik. Petani menyatakan setuju terhadap masing-masing atribut dengan persentase yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BMT dapat diterima oleh petani.

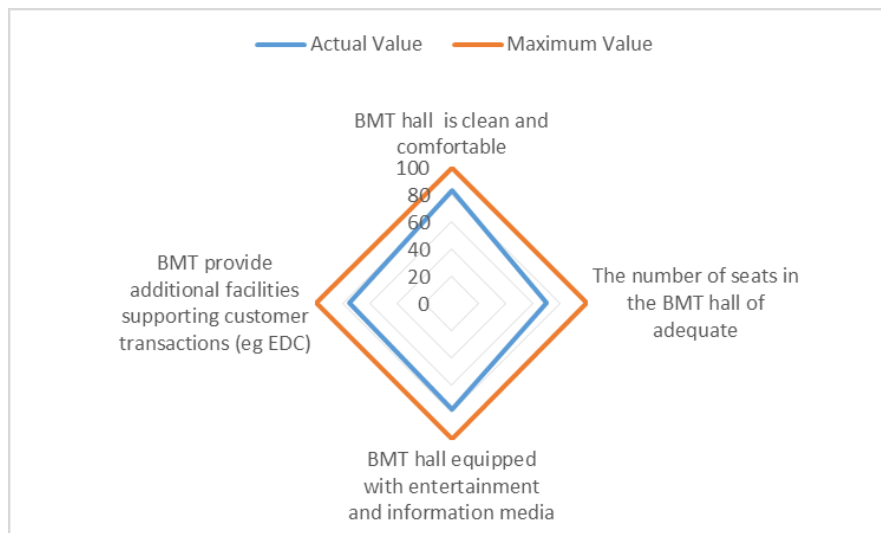
Persepsi petani terhadap pelayanan dari karyawan BMT

Pelayanan yang baik merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap karyawan dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa, termasuk BMT. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan anggota terhadap BMT. Dan apabila anggota atau nasabah sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, maka hal ini akan menumbuhkan loyalitas dalam diri anggota atau nasabah.

Persepsi petani terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan BMT dibuat dalam 6 variabel, yaitu kecepatan dan ketepatan pelayanan, ketelitian dan keakuratan pelayanan, kemampuan karyawan dalam menjelaskan produk, keramahan dan kesopanan karyawan, penampilan karyawan, dan kesigapan karyawan dalam menangani keluhan nasabah (anggota). Persepsi petani terhadap aspek pelayanan dari karyawan KJKS dapat dilihat pada Gambar 1. Pada Gambar 1 diketahui bahwa persepsi petani terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan BMT sangat baik. Hal ini terlihat dari masing-masing variabel yang ditanyakan, dimana petani merasa sangat setuju dengan bentuk atau pola pelayanan pada BMT selama ini. Dari sini terlihat bahwasanya petani merasa sudah dilayani kebutuhannya dengan baik oleh karyawan BMT. Pola pelayanan yang diterapkan BMT lebih mengedepankan nuansa kekeluargaan dan bersifat informal, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Kondisi ini mampu menghilangkan kesan 'kaku' yang melekat pada lembaga keuangan. Hal ini juga yang mengakibatkan petani anggota BMT merasa lebih nyaman ketika sedang bertransaksi.



Gambar 1. Nilai Komponen Persepsi Petani terhadap Pelayanan dari Karyawan BMT
Persepsi petani terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki BMT

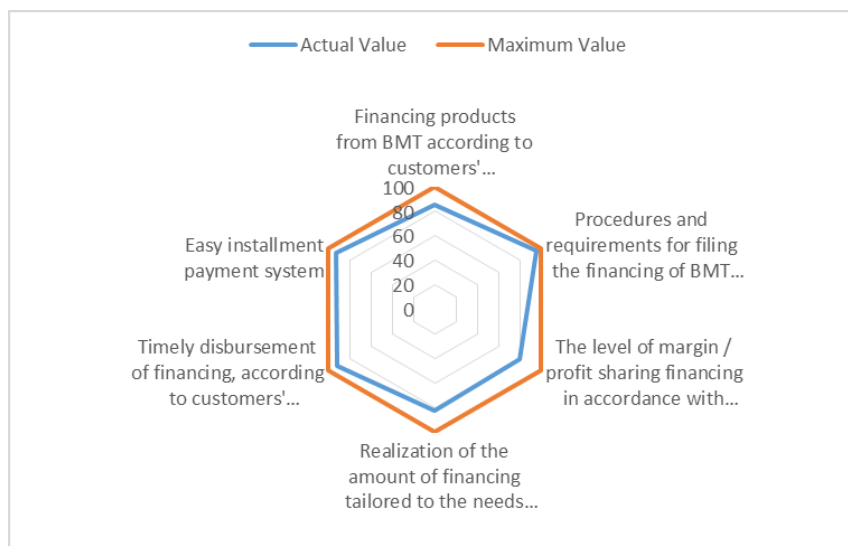


Gambar 2. Nilai Komponen Persepsi Petani terhadap Sarana dan Prasarana BMT

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BMT tentunya sangat menunjang kegiatan operasional BMT dan mempengaruhi tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan dari BMT. Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa petani menyatakan setuju atau puas dengan sarana dan prasarana yang dimiliki BMT, dengan kata lain petani mempersepsikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BMT sudah baik. Petani menilai kebersihan dan kenyamanan ruangan kantor pelayanan sangat baik. Desain interior ruangan yang rapi dan adanya fasilitas pendingin ruangan menjadikan petani anggota merasa nyaman ketika bertransaksi. Sebanyak 70 persen petani menyatakan setuju dengan memadainya jumlah kursi yang ada di ruang pelayanan. Begitu juga dengan variabel ketersediaan media hiburan dan fasilitas pendukung transaksi dalam ruang pelayanan BMT.

Persepsi petani terhadap produk pembiayaan pertanian BMT

Fitur yang dimiliki oleh produk pembiayaan akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih produk tersebut. Produk pembiayaan pertanian dari BMT Surya Abadi menggunakan akad *murabahah*, dengan skema angsuran jatuh tempo (dibayar ketika panen). Pola pembiayaan ini terbukti digemari oleh anggota BMT, terutama petani. Hal itu dapat dilihat dari persepsi petani yang sangat menyetujui terkait fitur produk yang melekat pada produk pembiayaan pertanian BMT.



Gambar 3. Nilai Komponen Persepsi Petani terhadap Produk Pembiayaan BMT

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa sebanyak 85,91 persen petani menyatakan sangat setuju bahwa produk pembiayaan pertanian BMT sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan dalam hal ini mengandung dua dimensi pengertian, yaitu waktu dan jumlah. Dari sisi waktu, petani membutuhkan pembiayaan pada saat akan memulai kegiatan usahatani. Sedangkan dimensi jumlah terkait dengan ketepatan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan petani untuk kegiatan usahatannya. Persepsi petani akan kedua hal ini menunjukkan bahwa petani merasa sangat setuju akan kebijakan yang diterapkan oleh BMT dalam hal waktu pencairan pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diberikan. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata untuk variabel waktu dan jumlah, yaitu masing-masing 92,27 persen dan 82,27 persen.

Dalam hal prosedur dan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan pertanian, sejauh ini petani menganggap hal tersebut cukup sederhana sehingga tidak merepotkan mereka. Hal itu direpresentasikan dengan persepsi petani yang sangat setuju dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh BMT. Begitu juga dengan nilai margin atau bagi hasil pembiayaan yang diterapkan oleh BMT. Petani menganggap jumlah tersebut masih wajar dan relatif rendah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel-variabel yang signifikan untuk meningkatkan peluang akses petani ke pembiayaan pertanian syariah adalah jarak rumah petani ke kantor layanan BMT, *cost of fund*, dan pandangan petani terhadap sistem bunga kredit.
2. Petani menilai keberadaan BMT berperan dalam mendukung kegiatan usahatani padi ataupun aktivitas perekonomian lainnya. Dari sisi pelayanan karyawan, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta produk pembiayaan pertanian dari BMT, petani menilai hal tersebut sudah cukup baik. Petani contoh menyatakan setuju terhadap masing-masing atribut persepsi dengan persentase yang berbeda.

Adapun saran yang dapat dikemukakan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. BMT memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang di tengah masyarakat petani perdesaan, bahkan kedepannya dapat menjadi referensi sumber permodalan utama bagi petani.

Terkait hal ini, diharapkan adanya tindakan nyata dari segenap pemangku kepentingan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya BMT.

2. Peningkatan pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana, serta inovasi produk pembiayaan diharapkan dapat terus dilakukan oleh BMT agar keberadaannya dapat diterima dan senantiasa mendatangkan manfaat bagi petani dan masyarakat secara umum. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang sistem operasional BMT dapat terus dilaksanakan untuk meningkatkan jangkauan layanan dan pangsa pasar. BMT juga perlu merumuskan kebijakan yang dapat menekan *moral hazard* yang dilakukan oleh debitur, terutama yang berkaitan dengan kesesuaian penggunaan pembiayaan dengan akadnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni L, Puspitasari H, Ayubbi SE, Wiliasih R. 2013. Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah*. 1(1):56-67.
- Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. *Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. 4(2):146-164.
- [BI] Bank Indonesia. 2010. Ringkasan Pokok-Pokok Hasil Penelitian; Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Pulau Jawa. Jakarta (ID). BI.
- [BI] Bank Indonesia. 2012. Statistik Perbankan Indonesia. Vol: 10 No. 6 Mei 2012. Jakarta (ID). BI.
- Beik IF, Hafiduddin D. 2008. Enhancing the role of sukuk on agriculturesektor financing in Indonesia: proposed model. Di dalam Ali SS, editor. *Proceeding of International Conference of Islamic Capital Market (2007 Ags 25-27)*; Jakarta, Indonesia. Jeddah (KSA): Islamic Development Bank. 85-96.
- [BPS Lamteng] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. 2013. Lampung Tengah dalam Angka (ID). BPS Lamteng.
- Cooper DR, Emory CW. 1996. Metode Penelitian Bisnis Jilid I. Jakarta (ID): Erlangga[Dinkop UKM Lamteng] Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah. 2013. Keragaan Koperasi Kabupaten Lampung Tengah. Gunung Sugih (ID). Dinkop UKM Lamteng.
- Dharmawan, Arya Hadi. 2010. Agenda Riset Strategis Bidang Penanggulangan Kemiskinan 2010-2015. [Internet]. [diunduh 2013 Sep 25]. Tersedia pada: http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/7016/Buku_ARS_KEMISKINAN_Versi_9%20Januari_2010.pdf;jsessionid=13FD7A43E2D469E25E08D3B6D064A536?sequence=1
- Hamid ES, Mubyarto, Dumairy. 1986. Kredit pedesaan di Indonesia. Yogyakarta (ID): BPFE
- Hendayana R, Bustaman S, Sunandar N, Jamal E. 2009. Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
- Hermawan H, Andrianyta H. 2012. Lembaga keuangan mikro agribisnis: terobosan penguatan kelembagaan dan pembiayaan di perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 10 Nomor 2, Juni 2012. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
- Ibrahim AH, Bauer S. 2013. Access to Micro credit and its Impact on Farm Profit Among Rural Farmers in Dryland of Sudan. *Global Advanced Research Journal of Agricultural Science*. 2 (3):88-102.
- Intriligator MD. 1978. *Econometric Models, Techniques and Applications*. New Jersey (US): Prentice Hall Inc.
- Mahabirama AK, Daryanto HKS, Winandi R. 2013. Analisis Efisiensi dan Pendapatan Usahatani Kedelai di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. 11(2):197-206
- Meyer, Richard L.; Nagarajan, Geetha. 2000. *Rural Financial Markets in Asia: Policies Paradigms, and Performance*. © Asian Development Bank. <http://hdl.handle.net/11540/311>.
- Nurmanaf AZ. 2007. Lembaga informal pembiayaan mikro lebih dekat dengan petani. *Analisis Kebijakan Pertanian* 5(2): 99-109. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Okten C, Osili UO. 2004. Social Network and Credit Access in Indonesia. *Elsevier World Development*. 32 (7):1225-1246.

- Prayoga A, Fahmi, I, Asmara A. 2017. Daya saing BMT berdasarkan aspek kelembagaan. *Jurnal Infokop* 27 (1): 1-14
- Poliquit LY. 2006. Accessibility of Rural Credit Among Small Farmers in the Philippines. Master Thesis. Institute of Natural Resources, Massey University, Palmerston Nort.
- [Puskopsyah Lampung] Pusat Koperasi Syariah Lampung. 2013. Daftar Anggota Puskopsyah Lampung. Metro (ID). Puskopsyah Lampung
- Rangkuti F. 2003. *Measuring Consumer Satisfaction: Gaining Customer Relationship Strategy*. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama.
- Reyes A, Lensink R, Kuyvenhoven A, Moll H. 2012. Impact of Access to Credit on Farm Productivity of Fruit and Vegetable Growers In Chile. [Proceedings].
- Rivai HA, Lukviarman N, Syafrizal, Lukman S, Andrianus F, Masrizal. 2008. *Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah vs Bank Konvensional*. [Working Paper].
- Silalahi U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung (ID): Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung (ID): Penerbit Alfabeta.
- Sumarwan U. 2004. *Perilaku Konsumen, Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran*. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
- Suraya, Sumardjo, Mangkuprawira S, Hafidhuddin D. 2010. Farmers Perceptions and Preferences in Ciamis and Bantul on Islamic Microfinance Institutions (BMT). *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*. 13(3):245–252.
- Syarif T. 2014. Prinsip prudensial versus modal sosial dalam pengembangan koperasi simpan pinjam. *Jurnal Infokop*. 24 (1): 18-33.
- Syukur M, Sumaryanto CM, Rasahan CA. 1990. Pola Pelayanan Kredit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Pedesaan Jawa Barat. Bogor (ID). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Departemen Pertanian
- Syukur M, Saliem HP, Pasaribu SH. 1998. Pola Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Barat. Pusat Penelitian Agro Ekonomi Bogor
- Zeller M, Diagne A, Mataya C. 1998. Market acces by smallholder farmers in Malawi: Implications for technology adoption, agricultural productivity and crop income. *Agricultural Economics*, 19: 219-229.